



Optimalisasi Pengelolaan Arsip Pegawai Negeri Sipil Melalui Digitalisasi Data: Implementasi Web Siasn Pada Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar

**Komang Ayu Kusumasanti¹, Ni Nyoman Menuh², Ida Bagus Ngurah Wimpascima³,
Nyoman Parta⁴**

^{1,2,3,4} STIMI Handayani

*Penulis Korespondensi: nyomanmenuh61@gmail.com

Received: 05/05/2026 | Accepted: 08/06/2026 | Publication: 05/08/2026

Abstract: *The digitalization of personnel records is a crucial component of bureaucratic transformation toward the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE). This study aims to analyze the optimization of civil servant (PNS) records management through data digitalization at the Regional Office X of the National Civil Service Agency (BKN) in Denpasar. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the optimization of records management was carried out through three main stages: recording personnel records in Google Sheets, cross-verifying data using the SIASN Web application, and reorganizing both physical and digital records. The digitalization process significantly improved data accuracy, enhanced the efficiency of records retrieval, and supported the integration of personnel data into the national civil service information system. However, its implementation continues to face several challenges, including limited network infrastructure and discrepancies between physical records and digital data. Therefore, strengthening information technology infrastructure, accelerating the digitalization of personnel records, and developing more comprehensive standard operating procedures are essential to improve the quality and effectiveness of personnel records management.*

Keywords: *Records Digitalization, Records Management, Electronic-Based Government System (SPBE).*



Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Kusumasanti, K. A., Menuh, N. N., Wimpascima, I. B. N., & Parta, N. (2026). *Optimalisasi pengelolaan arsip pegawai negeri sipil melalui digitalisasi data: Implementasi Web SIASN pada Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar*. **Journal of Innovation Research and Knowledge**, 6(3), 1753–1764. <https://doi.org/10.53625/jirk.v6i3.13090>

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda utama dalam reformasi birokrasi di Indonesia sebagai upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bentuk implementasi transformasi tersebut adalah digitalisasi pengelolaan arsip, khususnya arsip kepegawaian yang memiliki nilai administratif, hukum, dan historis. Arsip kepegawaian merupakan sumber informasi utama yang menjadi dasar dalam berbagai proses administrasi, seperti mutasi, kenaikan pangkat, promosi jabatan, hingga penetapan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kearsipan di Indonesia diatur secara ketat oleh negara untuk menjamin keutuhan dan ketersediaan bukti hukum. Landasan hukum yang menjadi pijakan utama bagi Kantor

Regional X BKN Denpasar adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-undang ini memiliki visi yang modern, mendefinisikan arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media, termasuk secara eksplisit format elektronik, sekaligus menegaskan bahwa arsip digital memiliki kedudukan hukum yang setara dengan arsip fisik.

Oleh karena itu, pengelolaan arsip yang akurat, aman, dan mudah diakses menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan arsip secara konvensional yang masih mengandalkan dokumen fisik menghadapi berbagai kendala. Arsip dalam bentuk hardcopy rentan mengalami kerusakan akibat usia dokumen, bencana alam, maupun kesalahan penyimpanan. Selain itu, kebutuhan ruang penyimpanan yang semakin besar serta proses pencarian arsip yang memerlukan waktu lama menyebabkan rendahnya efisiensi pelayanan administrasi. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika jumlah arsip terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pegawai dan dinamika administrasi kepegawaian. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan arsip konvensional tidak lagi mampu memenuhi tuntutan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan berbasis teknologi informasi.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengembangkan sistem informasi kepegawaian melalui Web Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (Web SIASN). Sistem ini berfungsi sebagai pusat data kepegawaian nasional (*Single Source of Truth*) yang mengintegrasikan seluruh informasi kepegawaian secara elektronik. Implementasi Web SIASN tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, tetapi juga mendukung terciptanya data yang valid, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh instansi pemerintah. Digitalisasi arsip menjadi prasyarat utama dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem tersebut karena seluruh data harus diverifikasi dan disesuaikan dengan dokumen fisik yang dimiliki setiap instansi.

Kantor Regional X BKN Denpasar sebagai salah satu unit pelaksana teknis BKN memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan arsip kepegawaian wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Salah satu kegiatan strategis yang dilakukan adalah digitalisasi arsip personal file Pegawai Negeri Sipil mutasi melalui proses pencatatan Nomor Induk Pegawai (NIP), verifikasi data menggunakan Web SIASN, serta penataan kembali arsip fisik dan digital. Proses tersebut bertujuan meningkatkan akurasi data, mempercepat proses temu kembali arsip, serta mengurangi potensi terjadinya ketidaksesuaian data antara arsip fisik dengan database elektronik. Keberhasilan proses digitalisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas verifikasi data dan koordinasi antarpetugas yang terlibat.

Meskipun implementasi digitalisasi telah memberikan berbagai manfaat, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur jaringan, adanya disparitas data antara arsip fisik dengan sistem elektronik, serta perlunya standar operasional yang lebih rinci dalam proses sinkronisasi data historis. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan digitalisasi arsip guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat optimalisasi pengelolaan arsip kepegawaian. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis proses optimalisasi pengelolaan arsip Pegawai Negeri Sipil melalui digitalisasi data di Kantor Regional

X BKN Denpasar. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan sistem pengelolaan arsip digital pada instansi pemerintah serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai proses optimalisasi pengelolaan arsip Pegawai Negeri Sipil melalui digitalisasi data di Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) Denpasar. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil pengamatan langsung, pengalaman praktis, serta interaksi dengan informan yang terlibat dalam proses digitalisasi arsip.

Subjek penelitian adalah sekretaris dan staf Bidang Informasi Kepegawaian (INKA) Kantor Regional X BKN Denpasar yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip kepegawaian. Adapun objek penelitian adalah proses digitalisasi arsip Pegawai Negeri Sipil mutasi yang meliputi kegiatan pencatatan data arsip ke dalam Google Sheet, verifikasi data menggunakan Web SIASN, serta penataan arsip fisik dan digital.

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses digitalisasi arsip dan wawancara dengan pegawai serta pembimbing lapangan mengenai prosedur pengelolaan arsip dan implementasi Web SIASN. Data sekunder diperoleh dari dokumen internal Kantor Regional X BKN Denpasar, struktur organisasi, serta berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan arsip digital dan administrasi kepegawaian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung tahapan digitalisasi arsip dan penggunaan Web SIASN. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan arsip untuk memperoleh informasi mengenai prosedur kerja, kendala, dan upaya optimalisasi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui penelaahan dokumen administrasi, laporan kegiatan, serta arsip pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dibandingkan dengan teori pengelolaan arsip digital serta konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menghasilkan interpretasi yang komprehensif mengenai efektivitas digitalisasi arsip di Kantor Regional X BKN Denpasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan arsip Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) Denpasar dilaksanakan melalui proses digitalisasi yang terintegrasi dengan Web Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Implementasi digitalisasi dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu pencatatan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari arsip fisik ke dalam *Google Sheet* sebagai media pencatatan digital, verifikasi silang antara arsip fisik dengan data pada Web SIASN, serta

penataan kembali arsip fisik dan digital berdasarkan klasifikasi instansi. Tahapan tersebut membentuk suatu alur kerja yang mampu meningkatkan akurasi data, mempercepat proses temu kembali arsip, serta mendukung integrasi data kepegawaian secara nasional.

Tahap pencatatan data ke dalam *Google Sheet* menjadi langkah awal dalam proses digitalisasi arsip. Penggunaan media berbasis *cloud* memungkinkan seluruh data terdokumentasi secara sistematis, mudah dipantau, serta dapat diakses secara kolaboratif oleh petugas yang berwenang. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alih media dari dokumen fisik ke bentuk elektronik, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengendalian dokumen dan monitoring proses kerja. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Lasa HS (2009) yang menyatakan bahwa digitalisasi arsip bertujuan meningkatkan efisiensi penyimpanan, kemudahan akses informasi, dan keamanan dokumen organisasi.

Tahapan berikutnya adalah verifikasi silang (*cross-validation*) antara data pada arsip fisik dengan data yang terdapat pada Web SIASN. Tahap ini merupakan proses paling krusial karena menentukan validitas dan integritas data sebelum menjadi bagian dari basis data nasional. Web SIASN berfungsi sebagai *Single Source of Truth* (SSOT) sehingga seluruh informasi kepegawaian harus sesuai dengan dokumen sumber yang sah. Proses verifikasi mampu meminimalkan kesalahan input data (*human error*) sekaligus mencegah terjadinya data *discrepancy* yang dapat memengaruhi pelayanan administrasi kepegawaian, seperti mutasi, kenaikan pangkat, maupun pensiun. Temuan ini mendukung konsep *Data Quality Management* yang dikemukakan oleh Davenport (1997), bahwa kualitas data merupakan faktor utama dalam meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan organisasi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa digitalisasi arsip memberikan dampak positif terhadap efisiensi proses administrasi. Sebelum digitalisasi, pencarian arsip dilakukan secara manual melalui penyimpanan fisik (*Rolpack*) sehingga membutuhkan waktu relatif lama. Setelah data terdigitalisasi dan terintegrasi dalam Web SIASN, proses pencarian informasi dapat dilakukan dalam hitungan detik. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aldayanti (2025) yang menyimpulkan bahwa meskipun implementasi sistem arsip digital di Pekanbaru menunjukkan prospek yang menjanjikan dalam mewujudkan tata kelola arsip yang lebih transparan dan efisien, keberlanjutan proses digitalisasi tersebut sangat ditentukan oleh tiga aspek utama, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur dan teknologi, serta integrasi kebijakan yang mendukung. Sementara hasil penelitian Rahmadi dan Rusmiati (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi sumber daya manusia berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan fleksibilitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Meskipun demikian, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh penerapan teknologi, tetapi juga sangat bergantung pada efektivitas kepemimpinan dalam mengelola perubahan, konsistensi dukungan kebijakan, serta kesiapan infrastruktur teknologi dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam



implementasi digitalisasi arsip, antara lain gangguan jaringan internet yang menghambat akses ke Web SIASN serta adanya perbedaan data antara arsip fisik dengan data elektronik yang memerlukan proses verifikasi lebih lanjut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan aplikasi, tetapi juga memerlukan dukungan infrastruktur teknologi, standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, percepatan digitalisasi arsip perlu diikuti dengan penguatan jaringan, penyempurnaan prosedur sinkronisasi data, dan pelatihan berkelanjutan bagi petugas pengelola arsip sehingga tujuan reformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Optimalisasi pengelolaan arsip PNS melalui digitalisasi data di Kantor Regional X BKN Denpasar berhasil meningkatkan akurasi, efisiensi, dan integrasi data kepegawaian melalui pemanfaatan Google Sheet dan Web SIASN. Keberhasilan digitalisasi tetap memerlukan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai dan pengelolaan data yang terstandarisasi.

Kantor Regional X BKN Denpasar disarankan mempercepat proses alih media arsip fisik ke digital, meningkatkan stabilitas jaringan internet, menyusun standar operasional prosedur (SOP) penanganan disparitas data, serta melaksanakan pelatihan berkala bagi pegawai mengenai pengelolaan arsip digital dan penggunaan Web SIASN. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, akurasi, dan keberlanjutan sistem pengelolaan arsip kepegawaian berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldayanti, T. A. R. (2025). Tantangan dan strategi digitalisasi arsip pada beberapa unit kearsipan di Pekanbaru: Kajian systematic literature review (SLR). *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, 2(3), 166–179.
- Asosiasi Arsiparis Indonesia. (2021). *Pedoman pengelolaan arsip elektronik di Indonesia*. Asosiasi Arsiparis Indonesia.
- Azmi. (2019). *Manajemen arsip elektronik*. Rajawali Pers.
- International Council on Archives. (2016). *Principles and functional requirements for records in electronic office environments*. International Council on Archives.
- ISO. (2016). *ISO 15489-1:2016 Information and documentation—Records management—Part 1: Concepts and principles*. International Organization for Standardization.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). *Peta jalan transformasi digital Indonesia 2021–2024*. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Kementerian PANRB.
- Lasa Hs. (2009). *Manajemen kearsipan*. Gadjah Mada University Press.
- Mulyadi. (2018). *Pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi*. PT RajaGrafindo Persada.
- National Archives of Australia. (2021). *Digital continuity 2020 policy*. National Archives of Australia.

- National Archives and Records Administration. (2022). *Electronic records management guidance*. U.S. National Archives and Records Administration.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
- Rahmadi, M. H., & Rusmiati, E. T. (2025). Transformasi digital manajemen SDM di instansi pemerintah: Adaptasi, tantangan, dan peluang. *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, 7(2), 113–121.
- Read, J., & Ginn, M. L. (2020). *Records management* (11th ed.). Cengage Learning.
- Robek, M. F., Brown, G. F., & Stephens, D. O. (2018). *Information and records management: Document-based information systems* (5th ed.). Glencoe/McGraw-Hill.
- Saffady, W. (2020). *Records and information management: Fundamentals of professional practice*. ARMA International.
- Sedarmayanti. (2018). *Manajemen perkantoran modern*. Mandar Maju.
- Smallwood, R. F. (2020). *Managing electronic records: Methods, best practices, and technologies* (2nd ed.). Wiley.
- State Records Authority of New South Wales. (2020). *Digital recordkeeping guidelines*. State Records NSW.
- The National Archives. (2021). *Guidance on managing digital records*. The National Archives.
- United Nations. (2022). *E-government survey 2022: The future of digital government*. United Nations.
- Upward, F. (2018). *Records management and the continuum model*. Monash University Publishing.
- World Bank. (2021). *GovTech maturity index: The state of public sector digital transformation*. World Bank.
- Yusup, P. M. (2019). *Pengelolaan arsip digital dalam organisasi modern*. PT Bumi Aksara.